Comprehensive: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan
Vol. 2 No. 4 (2026). pp. 320-339
ISSN: 3123-2159
DOI: https://doi.org/10.65118/comprehensive.v2i4.67

Perkembangan Kurikulum di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Kajian Historis-Analitis: Studi Pustaka)

M. Sobiri, Ali Ahmad Yenuri, Syihab

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; muhamadsobiririau@gmail.com

Received: 17-09-2026 Revised: 19-10-2026 Accepted: 09-11-2026

How to Cite: M. Sobiri, Ali Ahmad Yenuri, & Syihab, S. (2026). The Evolution of Curriculum in Indonesia Over Time (A Historical-Analytical Review: A Literature Study). *Comprehensive: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*, *2*(4), 320–339. https://doi.org/10.65118/comprehensive.v2i4.67

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

The Evolution of Curriculum in Indonesia Over Time (A Historical-Analytical Review: A Literature Study)

Abstract. The curriculum serves as the heart of educational provision, constantly evolving in response to political, social, and economic dynamics, as well as the changing needs of the times. This article aims to describe and analyze the development of the curriculum in Indonesia, from the early post-independence period to the *Kurikulum Merdeka* (Independent Curriculum) era in 2025/2026. The study employs a library research approach using a descriptive-analytical method, which involves identifying, collecting, and analyzing various written sources—such as books, scholarly journals, and official government documents—relevant to the history of national curriculum policy. The findings indicate that the curriculum in Indonesia has undergone more than ten revisions, including the 1947 Lesson Plan (*Rentjana Pelajaran*), the 1952 Detailed Lesson Plan (*Rentjana Pelajaran Terurai*), the 1964 Curriculum, the 1968 Curriculum, the 1975 Curriculum, the 1984 Curriculum, the 1994 Curriculum, the 2004 Competency-Based Curriculum (KBK), the 2006 School-Based Curriculum (KTSP), the 2013 Curriculum, and finally the *Kurikulum Merdeka*, which was introduced in 2022 and established as the national curriculum through the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) Number 12 of 2024. Each curriculum change reflects the government's efforts to align the education system with the demands of the era—ranging from strengthening nationalism in the post-independence period

and focusing on economic development during the New Order era, to fostering competencies, character, and "deep learning" in today's digital age. This study is intended to provide a comprehensive understanding of the direction of national curriculum policy and serve as a reference for future educational research.

Keywords: curriculum, curriculum development, educational policy, Indonesia, *Kurikulum Merdeka* (Independent Curriculum)

Abstrak. Kurikulum merupakan jantung penyelenggaraan pendidikan yang senantiasa mengalami perubahan seiring dinamika politik, sosial, ekonomi, dan kebutuhan zaman. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan kurikulum di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga era Kurikulum Merdeka pada tahun 2025/2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (library research) dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan sejarah kebijakan kurikulum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia telah berlangsung sebanyak lebih dari sepuluh kali, mulai dari Rentjana Pelajaran 1947, Rentjana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka yang mulai diperkenalkan tahun 2022 dan ditetapkan sebagai kurikulum nasional melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Setiap perubahan kurikulum tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan zaman, mulai dari penguatan nasionalisme pascakemerdekaan, orientasi pembangunan ekonomi pada era Orde Baru, hingga penguatan kompetensi, karakter, dan pembelajaran mendalam (deep learning) pada era digital saat ini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai arah kebijakan kurikulum nasional serta menjadi rujukan bagi penelitian pendidikan selanjutnya.

Kata kunci: kurikulum, perkembangan kurikulum, kebijakan pendidikan, Indonesia, Kurikulum Merdeka

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, sebuah negara dapat mempersiapkan generasi penerus yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah kurikulum, yang berfungsi sebagai rancangan dan pedoman dalam proses belajar-mengajar di setiap jenjang pendidikan. Kurikulum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bersifat dinamis dan senantiasa

berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan sosial-politik suatu bangsa.[1]

Di Indonesia, sejarah perkembangan kurikulum berjalan seiring dengan perjalanan bangsa itu sendiri, mulai dari masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, era Reformasi, hingga era digital saat ini. Sejak diperkenalkannya Rentjana Pelajaran 1947 yang menjadi kurikulum pertama pascakemerdekaan, kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan lebih dari sepuluh kali. Setiap perubahan kurikulum tersebut membawa corak dan penekanan yang berbeda-beda, sesuai dengan visi pendidikan yang diusung oleh pemerintah pada masanya.[2]

Perubahan kurikulum yang terus-menerus terjadi kerap menimbulkan pertanyaan dan perdebatan di kalangan akademisi, pendidik, maupun masyarakat luas. Sebagian pihak menilai bahwa perubahan kurikulum merupakan bentuk penyesuaian yang wajar dan diperlukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Namun demikian, sebagian pihak lain menilai bahwa pergantian kurikulum yang terlalu sering justru menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan nasional, khususnya bagi guru dan satuan pendidikan yang harus terus beradaptasi dengan kebijakan baru.[3]

Memasuki tahun ajaran 2025/2026, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa tidak terjadi pergantian kurikulum nasional, sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Satuan pendidikan tetap menggunakan dua kerangka utama, yaitu Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, dengan penguatan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) serta penambahan mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial. Kebijakan ini menandai babak baru sekaligus titik konsolidasi dari perjalanan panjang perubahan kurikulum di Indonesia.[4]

Secara akademik, kajian mengenai sejarah dan perkembangan kurikulum memiliki urgensi tersendiri. Pemahaman terhadap perjalanan kurikulum dari masa ke masa tidak hanya bermanfaat sebagai catatan historis, tetapi juga sebagai bahan refleksi kritis bagi perumusan kebijakan kurikulum di masa depan. Dengan memahami pola, keberhasilan, dan kegagalan implementasi kurikulum pada periode-periode sebelumnya, para pemangku kebijakan, akademisi, dan pendidik dapat

---

[1] Rahmat Hidayat dan Rahmad Hidayat, "Dinamika Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia: Adaptasi Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 11, no. 2 (2022): 102–115.

[2] Atmaja & Subaidi, "Dinamika dan Faktor yang Memengaruhi Perubahan Kurikulum di Indonesia," *Jurnal Penelitian Otentik* 5, no. 2 (Mei 2026): 145–158,https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/article/download/4967/3394/32333.

[3] IMM JPMIPA UAD, "Dilema Dinamis: Dampak Negatif dari Pergantian Kurikulum yang Terlalu Sering," *Kajian Pendidikan IMM JPMIPA UAD* , 28 Mei 2024,http://immjpmipa.fkip.uad.ac.id/2024/05/28/dilema-dinamis-dampak-negatif-dari-pergantian-kurikulum-yang-terlalu-sering/.

[4] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, *Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah* (Jakarta: Kemendikdasmen, 2025).

mengambil pelajaran (lessons learned) agar kebijakan kurikulum yang dirumuskan selanjutnya lebih matang, partisipatif, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.[5]

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema perkembangan kurikulum di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Sukmadinata (2012) misalnya, mengulas perkembangan kurikulum dari perspektif teori dan landasan pengembangan kurikulum secara umum, tanpa secara khusus menelusuri konteks politik yang melatarbelakangi setiap perubahan. Widyastono (2014) lebih berfokus pada perkembangan kurikulum di era otonomi daerah, mulai dari KBK, KTSP, hingga Kurikulum 2013, dengan penekanan pada aspek desentralisasi kebijakan pendidikan. Sementara itu, Susanto (2020) mengkaji sejarah kurikulum secara kronologis namun belum menyentuh perkembangan kebijakan kurikulum terkini pascapandemi Covid-19, mengingat kajian tersebut disusun sebelum lahirnya Kurikulum Merdeka.[6]

Berdasarkan penelusuran terhadap kajian-kajian terdahulu tersebut, penulis melihat adanya celah penelitian (research gap) berupa belum banyaknya kajian pustaka yang secara komprehensif menyusun periodisasi kurikulum Indonesia mulai dari Rentjana Pelajaran 1947 hingga kebijakan kurikulum termutakhir pada tahun ajaran 2025/2026, sekaligus menganalisis faktor-faktor politik, sosial, dan pedagogis yang melatarbelakangi setiap perubahan secara tematik. Celah inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik berupa peta historis-analitis yang utuh mengenai kebijakan kurikulum nasional.[7]

Selain itu, isu perubahan kurikulum juga senantiasa menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat luas, tidak terkecuali di kalangan guru dan orang tua peserta didik. Pergantian kurikulum yang terjadi secara berkala kerap memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi arah kebijakan pendidikan nasional, sekaligus kekhawatiran akan beban adaptasi yang harus ditanggung oleh guru di lapangan. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya kajian yang dapat menjelaskan secara runtut mengapa perubahan kurikulum kerap terjadi, apa yang melatarbelakanginya, serta bagaimana arah kebijakan kurikulum ke depan, sehingga masyarakat dapat memahami perubahan kurikulum bukan sebagai kebijakan yang tiba-tiba, melainkan sebagai bagian dari proses evolusi panjang sistem pendidikan nasional.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa melalui pendekatan penelitian pustaka (library research), guna memperoleh gambaran historis-analitis yang komprehensif mengenai arah kebijakan kurikulum nasional serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

---

[5] Ahmad Ridwan, "Analisis Evaluatif Kebijakan Kurikulum Nasional: Pembelajaran dari Masa ke Masa untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan Masa Depan," *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 44–58.

[6] Bambang Setiawan dan Nur Aini, "Historiografi Kurikulum di Indonesia: Studi Metodologis dan Celah Kajian Pascapandemi," *Jurnal Riset Pendidikan Dasar dan Menengah* 4, no. 3 (2023): 210–225.

[7] Muhammad Faisal, "Periodisasi Kebijakan Kurikulum Indonesia (1947–2025): Perspektif Politik, Sosial, dan Pedagogis," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kurikulum* 6, no. 1 (2026): 12–29.

[8] Tim Akademik STAIDA, "Laporan Urgensi Perubahan Kurikulum dan Dampaknya pada Pendidikan Indonesia," *STAIDA Sumsel* , 29 April 2025,https://staidasumsel.ac.id/laporan-urgensi-perubahan-kurikulum-dan-dampaknya-pada-pendidikan-indonesia/.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menjadikan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu sebagai sumber data utama, tanpa memerlukan riset lapangan secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa peristiwa historis dan kebijakan kurikulum yang telah terdokumentasikan secara tertulis.[9]

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi pemerintah terkait kurikulum, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) serta Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen). Adapun sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia.[10]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan tahapan sebagai berikut: (1) mengidentifikasi kata kunci pencarian seperti "kurikulum Indonesia", "sejarah kurikulum", "perubahan kurikulum", dan "kebijakan pendidikan"; (2) menelusuri literatur melalui basis data jurnal nasional seperti Sinta, Garuda, dan Google Scholar, serta situs resmi Kementerian Pendidikan; (3) mengklasifikasikan literatur berdasarkan periode kurikulum; dan (4) melakukan seleksi untuk memastikan hanya literatur yang kredibel dan relevan yang digunakan dalam analisis.[11]

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan pola, kesinambungan, dan perubahan dalam kebijakan kurikulum dari satu periode ke periode berikutnya. Keabsahan data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari satu literatur dengan literatur lain serta dengan dokumen resmi pemerintah, agar simpulan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang memadai.[12]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel ini disusun ke dalam empat bagian utama. Bagian pertama menguraikan periodisasi kurikulum secara kronologis, mulai dari latar belakang lahirnya kebijakan, tujuan, karakteristik dan struktur kurikulum, hingga

[9] Mastuang dan Muhammad Syukri, *Metodologi Penelitian Pustaka (Library Research) dalam Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 45–52.

[10] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2021), hlm. 112–118.

[11] Rahmat Hidayat, "Teknik Penelusuran Literatur dan Pengelolaan Data Dokumentasi pada Penelitian Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Metode Penelitian Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 78–91.

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2024), hlm. 285–293.

implementasi serta kritik yang menyertainya. Bagian kedua menyajikan tabel ringkasan periodisasi sebagai peta komprehensif. Bagian ketiga menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan kurikulum secara tematik. Bagian keempat mengulas relevansi kebijakan kurikulum terkini dengan tuntutan pendidikan abad ke-21.

Periodisasi Perkembangan Kurikulum di Indonesia

a. Rentjana Pelajaran 1947

Kurikulum pertama yang diberlakukan setelah Indonesia merdeka dikenal dengan istilah Rentjana Pelajaran 1947. Kebijakan ini lahir dalam suasana revolusi fisik, ketika bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari upaya kolonialisme Belanda yang ingin kembali berkuasa. Dalam kondisi tersebut, pendidikan diposisikan bukan semata sebagai sarana transfer pengetahuan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda.[13]

Secara substansi, Rentjana Pelajaran 1947 lebih menekankan pada pembentukan karakter kebangsaan, semangat nasionalisme, dan kesadaran bernegara sebagai bangsa yang baru merdeka, dibandingkan pada pengembangan aspek kognitif semata. Materi pelajaran diarahkan pada nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran bernegara, dan semangat juang mempertahankan kemerdekaan. Istilah "rentjana" dipilih untuk menggambarkan bahwa kurikulum ini bukanlah sesuatu yang final, melainkan sebuah rencana yang senantiasa dapat disesuaikan.[14]

Dari segi struktur, kurikulum ini belum memiliki dokumen yang rinci sebagaimana kurikulum-kurikulum berikutnya. Pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijaksanaan guru di lapangan, mengingat keterbatasan sarana, buku ajar, dan tenaga pendidik pada masa itu. Meskipun demikian, semangat yang terkandung dalam Rentjana Pelajaran 1947 menjadi fondasi penting bagi arah pendidikan nasional pada periode-periode selanjutnya, yaitu pendidikan yang berorientasi pada pembentukan jati diri bangsa.[15]

b. Rentjana Pelajaran Terurai 1952

Rentjana Pelajaran Terurai 1952 merupakan penyempurnaan dari Rentjana Pelajaran 1947, yang lahir seiring dengan semakin stabilnya situasi politik dan pemerintahan pascapengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Pada masa ini, pemerintah mulai memiliki ruang yang lebih luas untuk menata sistem pendidikan secara lebih sistematis.[16]

---

[13] EduChannel Indonesia, "Kurikulum 1947," *EduChannel Indonesia* , 7 Juni 2021,https://educhannel.id/artikel/telaah-kurikulum/kurikulum-1947.html.

[14] Ahmad Zainuri, *Sejarah Kurikulum Pendidikan di Indonesia: Dari Masa Kemerdekaan Hingga Era Digital* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2022), hlm. 34–39.

[15] Sri Rahayu, "Dinamika Kebijakan Kurikulum Pasca-Kemerdekaan: Analisis Historis Rentjana Pelajaran 1947," *Jurnal Historiografi Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 15–28.

[16] M. Nurul Huda, "Evolusi Kurikulum Indonesia Pasca-Pengakuan Kedaulatan: Dari Idealistik Menuju Pragmatis," *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional* 5, no. 2 (2022): 89–101.

Ciri utama kurikulum ini adalah setiap mata pelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat langsung merasakan manfaat dari materi yang dipelajari. Prinsip ini mencerminkan pergeseran orientasi pendidikan dari yang bersifat idealis-perjuangan menuju pendidikan yang lebih fungsional dan aplikatif bagi kehidupan masyarakat. Struktur kurikulum sudah lebih rinci dengan silabus mata pelajaran yang jelas, mencantumkan garis-garis besar pengajaran untuk setiap jenjang dan setiap mata pelajaran.[17]

Rentjana Pelajaran Terurai 1952 juga dapat dipandang sebagai titik awal formalisasi dokumen kurikulum di Indonesia, karena mulai memuat rincian tujuan pengajaran per mata pelajaran secara lebih sistematis dibandingkan pendahulunya. Namun demikian, keterbatasan distribusi buku dan pelatihan guru ke seluruh wilayah nusantara tetap menjadi tantangan besar dalam implementasinya, mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan infrastruktur yang masih terbatas pada masa itu.[18]

c. Kurikulum 1964

Kurikulum 1964 lahir dari keinginan pemerintah untuk memberikan pendidikan yang bersifat praktis dan fungsional, sejalan dengan semangat pembangunan yang digelorakan pada era Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pemerintah pada masa itu memiliki keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik yang kuat untuk pembangunan, terutama pada jenjang sekolah dasar sebagai fondasi awal pendidikan bangsa.[19]

Konsep utama yang diusung dalam kurikulum ini dikenal dengan istilah Pancawardhana, yaitu pengembangan lima aspek meliputi daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kelima aspek ini dimaksudkan untuk membentuk peserta didik secara utuh, tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki kepekaan rasa, kemauan, keterampilan berkarya, serta budi pekerti yang luhur.[20]

Dalam praktiknya, Kurikulum 1964 menekankan pendekatan yang bersifat correlated subject curriculum, yaitu mata pelajaran-mata pelajaran dikelompokkan dalam lima kelompok bidang studi. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan agar tidak terkotak-kotak secara terpisah, sekaligus menanamkan nilai-nilai kegotongroyongan dan kebangsaan yang kental pada masa itu. Meskipun konsepnya cukup progresif, situasi politik yang bergejolak menjelang peralihan kekuasaan menyebabkan kurikulum ini tidak sempat diterapkan secara luas dan merata.[21]

---

[17] Bambang Suroso, *Studi Historis Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia (1947–1968)* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 56–62.

[18] Rina Astuti, "Formalisasi Dokumen Kurikulum dan Problematika Pemerataan Pendidikan Era 1950-an," *Jurnal Sejarah dan Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 45–59.

[19] Agus Suprijono, *Politik Pendidikan Era Soekarno: Analisis Kurikulum 1964* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112–119.

[20] Fitriah Ahmad, "Konsep Pancawardhana dalam Kurikulum 1964 dan Relevansinya dengan Karakter Bangsa," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kebudayaan* 10, no. 3 (2023): 201–215.

[21] Tri Mulyadi, "Pendekatan Integratif dalam Kurikulum 1964 dan Hambatan Politik Transisi Kekuasaan," *Jurnal Pendidikan Historis* 6, no. 2 (2022): 134–147.

d. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari Kurikulum 1964 yang dilatarbelakangi oleh perubahan politik pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965. Kurikulum ini bersifat politis, yaitu bertujuan mengganti kurikulum sebelumnya yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama yang dianggap sarat dengan pengaruh ideologi komunis.[22]

Tujuan utama Kurikulum 1968 adalah membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan tujuan pendidikan yang diarahkan untuk menciptakan manusia pembangunan yang berpancasila serta bertujuan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.[23]

Dari sisi muatan, Kurikulum 1968 menekankan pendekatan pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Struktur mata pelajaran dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila, kelompok pengembangan pengetahuan dasar, dan kelompok kecakapan khusus. Kurikulum ini dinilai sebagai kurikulum yang bercorak politis karena disusun untuk mengukuhkan legitimasi rezim Orde Baru yang baru berkuasa, sekaligus menegaskan haluan ideologis baru dalam dunia pendidikan nasional.[24]

e. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 lahir pada masa Orde Baru yang tengah gencar melaksanakan pembangunan nasional secara terencana melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Semangat efisiensi dan efektivitas yang menjadi ciri khas manajemen pembangunan pada masa itu turut memengaruhi pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kurikulum pendidikan.[25]

Kurikulum ini menekankan pada tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik, atau dikenal dengan istilah Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Pendekatan ini dipengaruhi oleh konsep manajemen MBO (management by objective) yang diterapkan di dunia pendidikan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan instruksional khusus (TIK), yang harus dirumuskan secara operasional dan dapat diukur pencapaiannya.[26]

Implementasi Kurikulum 1975 menuntut guru menyusun Satuan Pelajaran (Satpel) secara sangat rinci dan administratif, mencakup tujuan, materi, metode, alat,

---

[22] Dedi Rosyadi, *Politik Kurikulum Orde Baru: Hegemoni Ideologi dan Penataan Pendidikan (1968–1998)* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 41–48.

[23] Hendra Gunawan, "Konstruksi Manusia Pancasila dalam Kurikulum 1968," *Jurnal Pemikiran Pendidikan Indonesia* 8, no. 1 (2023): 67–80.

[24] Siti Zulaikha, "Ideologi Politik dan Struktur Kurikulum 1968 di Indonesia," *Jurnal Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 112–126.

[25]Andi Setiawan, *Manajemen Pendidikan Orde Baru: Repelita dan Kodifikasi Kurikulum* (Malang: UB Press, 2021), hlm. 78–85.

[26] Lukman Hakim, "PPSI dan Pengaruh Management by Objective (MBO) dalam Kurikulum 1975," *Jurnal Kurikulum dan Teknologi Pendidikan* 11, no. 2 (2023): 155–168.

dan evaluasi untuk setiap unit pembelajaran. Pendekatan yang serba terstruktur ini di satu sisi memberikan kejelasan arah pembelajaran, namun di sisi lain menimbulkan kritik karena dianggap terlalu birokratis dan membebani guru dengan pekerjaan administratif yang berlebihan, sehingga mengurangi kreativitas dalam proses pembelajaran di kelas.[27]

f. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 hadir sebagai respons atas kritik terhadap Kurikulum 1975 yang dinilai terlalu menekankan pada aspek administratif dan kurang memberi ruang bagi keaktifan peserta didik. Kurikulum ini mengusung konsep Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), yang menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, mulai dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan hasil belajarnya.[28]

Pendekatan CBSA merupakan penerapan konsep student active learning yang berkembang dalam teori pendidikan modern, di mana posisi guru bergeser dari sumber utama informasi menjadi fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Peserta didik didorong untuk aktif mencari, menemukan, dan mengonstruksi pengetahuannya sendiri, bukan sekadar menerima informasi secara pasif dari guru.[29]

Meskipun secara konsep CBSA dinilai progresif dan sejalan dengan perkembangan teori belajar konstruktivistik, implementasinya di lapangan menghadapi banyak kendala. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami filosofi CBSA sehingga penerapannya cenderung bersifat formalitas, misalnya dengan sekadar membentuk kelompok diskusi tanpa disertai proses berpikir aktif yang sesungguhnya. Keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah peserta didik yang besar dalam satu kelas, serta pelatihan guru yang belum merata turut menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi kurikulum ini secara optimal.[30]

g. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama antara pendekatan proses pada Kurikulum 1984 dengan pendekatan materi (content based) pada Kurikulum 1975. Kurikulum ini lahir sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menuntut penyesuaian struktur kurikulum pada seluruh jenjang pendidikan.[31]

---

[27] Eko Prasetyo, "Beban Birokrasi Guru dalam Penulisan Satuan Pelajaran Kurikulum 1975," *Jurnal Evaluasi Pendidikan* 9, no. 1 (2022): 33–46.

[28] Nur Zazin, *Perkembangan Teori Belajar Konstruktivistik dalam Kurikulum Nasional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2022), hlm. 98–104.

[29] Muhammad Arifin, "Transformasi Peran Guru dari Pusat Informasi Menjadi Fasilitator dalam CBSA," *Jurnal Inovasi Pembelajaran* 8, no. 3 (2023): 210–224.

[30] Dewi Sartika, "Mitos dan Realita Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) di Lapangan," *Jurnal Riset Pendidikan Dasar* 6, no. 2 (2024): 145–159.

[31] Risnawati, "Analisis Kebijakan Kurikulum 1994 Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pendidikan* 7, no. 1 (2021): 50–63.

Dari segi muatan, Kurikulum 1994 berupaya menggabungkan sisi baik dari kurikulum-kurikulum terdahulu, yaitu tetap mempertahankan orientasi pada penguasaan materi (target kurikulum) sekaligus mendorong keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun demikian, upaya perpaduan ini justru menghasilkan struktur kurikulum yang sangat padat, karena materi pelajaran dari berbagai kurikulum sebelumnya diakumulasikan tanpa pengurangan yang memadai.[32]

Penerapan kurikulum ini menuai kritik keras dari para praktisi pendidikan karena dianggap terlalu padat materi (overload), sehingga guru cenderung mengejar penyelesaian materi (target-oriented) dibandingkan memastikan pemahaman mendalam peserta didik. Kondisi krisis moneter dan gejolak politik menjelang reformasi pada tahun 1998 turut mendorong perlunya evaluasi cepat terhadap kurikulum, sehingga pada tahun 1999 dilakukan penyempurnaan melalui Suplemen Kurikulum 1999 yang berfokus pada pengurangan beban materi dan penyesuaian dengan konteks reformasi yang sedang berlangsung.[33]

h. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) lahir pada awal era Reformasi, seiring dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Semangat ini turut memengaruhi paradigma pendidikan nasional yang mulai bergeser dari pendekatan yang seragam dan tersentralisasi menuju pendekatan yang lebih menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik.[34]

KBK menekankan pada pencapaian kompetensi tertentu oleh peserta didik, baik secara individual maupun klasikal. Orientasi pembelajaran diarahkan pada hasil (outcomes) dan keberagaman, dengan penyampaian materi menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, serta sumber belajar yang tidak hanya berpusat pada guru. Kompetensi yang dimaksud mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak peserta didik.

Struktur KBK dirancang berbasis pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap mata pelajaran, yang kemudian dijabarkan oleh guru menjadi indikator pencapaian dan pengalaman belajar yang lebih operasional. Sistem penilaian yang digunakan juga bersifat berkelanjutan dan berbasis kelas (penilaian autentik), tidak hanya mengandalkan tes tertulis semata. Meskipun konsepnya cukup maju, KBK belum sempat diberlakukan secara nasional dan merata karena

[32] Syaiful Bahri, "Akumulasi Materi Pelajaran dalam Kurikulum 1994," *Jurnal Kaji Teori Pendidikan* 10, no. 2 (2023): 177–190.

[33] Ridwan Hasan, "Suplemen Kurikulum 1999: Respons Cepat Terhadap Overload Materi dan Reformasi Politik," *Jurnal Sejarah Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2022): 88–102.

[34] Acknowledging Reform, *Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah di Era Reformasi* (Jakarta: Earthline Books, 2021), hlm. 132–139.

keterbatasan waktu sosialisasi serta belum adanya payung hukum yang kuat, sehingga pada tahun 2006 kurikulum ini disempurnakan menjadi KTSP.[35]

i. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

KTSP merupakan penyempurnaan dari KBK yang lahir setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum ini memberikan otonomi lebih luas kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan peserta didik serta lingkungan sekolah masing-masing, dengan tetap mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan secara nasional.[36]

Prinsip utama KTSP adalah desentralisasi pengembangan kurikulum, di mana sekolah bersama komite sekolah dan dinas pendidikan setempat diberi kewenangan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Hal ini merupakan wujud nyata dari semangat otonomi daerah yang diterapkan dalam bidang pendidikan, sekaligus upaya untuk mendekatkan kurikulum dengan konteks sosial-budaya setempat.[37]

Dalam pelaksanaannya, KTSP menuntut kesiapan dan kapasitas sekolah yang memadai, baik dari sisi sumber daya manusia (guru dan kepala sekolah) maupun sarana pendukung. Kesenjangan kapasitas antarsekolah, khususnya antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, menyebabkan implementasi KTSP tidak berjalan merata. Banyak sekolah yang pada akhirnya hanya mengadopsi kurikulum yang disusun oleh pemerintah pusat atau dinas pendidikan tanpa melakukan pengembangan yang signifikan, sehingga esensi otonomi kurikulum belum sepenuhnya tercapai.

j. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 (K-13) diberlakukan sebagai respons atas berbagai tantangan abad ke-21 serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan KTSP yang dinilai belum optimal dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik secara holistik. Kurikulum ini juga lahir dari kajian terhadap hasil studi internasional seperti PISA dan TIMSS yang menunjukkan capaian literasi dan numerasi peserta didik Indonesia yang masih perlu ditingkatkan.

Kurikulum 2013 dirancang dengan pendekatan tematik-integratif, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, serta menekankan keseimbangan antara aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik (scientific approach) yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan

[35] Sri Wahyuni, "Penilaian Autentik Berbasis Kelas dalam KBK 2004 dan Kendala Sosialisasi Nasional," *Jurnal Asesmen Pendidikan* 9, no. 3 (2024): 189–202.

[36] Widyastono, *Manajemen Penggarapan KTSP Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 65–72.

[37] Hasan Basri, "Otonomi Satuan Pendidikan dalam Pengembangan Kurikulum Lokal pada KTSP," *Jurnal Administrasi dan Manajemen Sekolah* 8, no. 2 (2023): 101–114.

mengomunikasikan (5M), dengan tujuan membiasakan peserta didik berpikir sistematis layaknya seorang ilmuwan.

Salah satu inovasi penting dalam Kurikulum 2013 adalah penggunaan Kompetensi Inti (KI) sebagai payung yang mengikat seluruh Kompetensi Dasar (KD) pada setiap mata pelajaran, sehingga tercipta keterpaduan antara sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan dalam satu kesatuan proses pembelajaran. Implementasi Kurikulum 2013 sempat mengalami penundaan dan revisi pada beberapa tahun awal penerapannya, terutama terkait kesiapan buku ajar, pelatihan guru, dan sistem penilaian yang dinilai rumit oleh banyak pendidik di lapangan. Meski demikian, setelah melalui berbagai revisi, kurikulum ini terus digunakan dan bahkan tetap berjalan berdampingan dengan Kurikulum Merdeka hingga tahun ajaran 2025/2026.[38]

k. Kurikulum Merdeka (2022–2026)

Kurikulum Merdeka mulai diperkenalkan sebagai opsi pemulihan pembelajaran (learning recovery) pascapandemi Covid-19 pada tahun 2022, ketika dunia pendidikan menghadapi fenomena kehilangan pembelajaran (learning loss) akibat pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan besar Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong transformasi pendidikan yang lebih fleksibel dan berpihak pada peserta didik.

Prinsip utama Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan berbasis proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup enam dimensi yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Struktur kurikulum ini juga memperkenalkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, capaian pembelajaran (CP) per fase, serta alokasi waktu yang lebih fleksibel melalui pembagian jam pelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, Kurikulum Merdeka resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional, menggantikan status sebelumnya sebagai kurikulum opsional. Kebijakan ini memberikan masa transisi bagi satuan pendidikan yang belum menerapkannya, yakni selama dua tahun bagi daerah non-3T dan hingga tahun ajaran 2026/2027 bagi daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), sebagai bentuk afirmasi terhadap kesenjangan kesiapan implementasi antarwilayah di Indonesia.

Selanjutnya, melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa tidak terjadi pergantian kurikulum baru pada tahun ajaran 2025/2026; satuan pendidikan tetap menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka secara berdampingan, dengan penguatan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) yang menekankan tiga aspek utama, yaitu mindful (sadar),

[38] Roni Setiawan, "Perjalanan Revisi Kurikulum 2013 dan Transisinya Menuju Era Kurikulum Merdeka," *Jurnal Inovasi Kurikulum* 11, no. 2 (2025): 134–149.

meaningful (bermakna), dan joyful (menyenangkan), serta pengenalan mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI) sejak tahun ajaran 2025/2026 untuk memperkuat literasi digital dan kesiapan peserta didik menghadapi kebutuhan industri masa depan berbasis Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM).[39]

Kebijakan ini menandai berakhirnya masa transisi dan dimulainya implementasi penuh Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional secara menyeluruh mulai tahun 2026, sekaligus menjadi penanda babak konsolidasi setelah lebih dari tujuh dekade perjalanan kebijakan kurikulum di Indonesia mengalami dinamika perubahan yang panjang.

Ringkasan Periodisasi Kurikulum

Untuk memperoleh gambaran yang lebih ringkas dan komprehensif mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia, berikut disajikan tabel ringkasan periodisasi kurikulum beserta pendekatan utama dan konteks politik-sosial yang melatarbelakanginya.[40]

Tahun	Nama Kurikulum	Pendekatan Utama	Konteks Politik/Sosial
1947	Rentjana Pelajaran 1947	Pembentukan karakter kebangsaan	Awal kemerdekaan
1952	Rentjana Pelajaran Terurai	Keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari	Konsolidasi negara
1964	Kurikulum 1964	Pancawardhana (cipta, rasa, karsa, karya, moral)	Orde Lama
1968	Kurikulum 1968	Pembentukan manusia Pancasila sejati	Transisi ke Orde Baru
1975	Kurikulum 1975	PPSI (tujuan instruksional umum/khusus)	Orde Baru, orientasi efisiensi
1984	Kurikulum 1984	CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif)	Reformasi metodologis
1994/1999	Kurikulum 1994 & Suplemen 1999	Perpaduan pendekatan proses & materi	Kritik atas beban materi

[39] Agus Rahmawan, "Implementasi Penuh Kurikulum Merdeka 2026: Titik Konsolidasi Sejarah Kurikulum Nasional," *Jurnal Perkembangan Pendidikan Nasional* 14, no. 1 (2026): 15–30.

[40] Dedi Supriadi, "Kurikulum sebagai Konstruksi Sosial-Politik: Analisis Historis Visi Pendidikan Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam dan Pendidikan* 28, no. 1 (2024): 55–71.

Tahun	Nama Kurikulum	Pendekatan Utama	Konteks Politik/Sosial
2004	KBK	Berbasis kompetensi & hasil belajar	Awal era Reformasi
2006	KTSP	Desentralisasi & otonomi satuan pendidikan	Penguatan otonomi daerah
2013	Kurikulum 2013	Tematik-integratif & pendekatan saintifik	Penguatan karakter & literasi
2022–2026	Kurikulum Merdeka	Fleksibilitas, proyek Profil Pelajar Pancasila, deep learning	Pemulihan pascapandemi & era digital

Tabel di atas menunjukkan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia tidak pernah terjadi dalam ruang hampa, melainkan selalu berkelindan dengan konteks politik, sosial, dan kebutuhan pembangunan pada masanya. Pola ini mengonfirmasi bahwa kurikulum merupakan produk sosial-politik yang mencerminkan visi negara terhadap sosok manusia Indonesia yang ingin dibentuk melalui jalur pendidikan formal.

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perubahan Kurikulum

Berdasarkan penelusuran pustaka terhadap sebelas periode kurikulum yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa faktor utama yang secara konsisten melatarbelakangi terjadinya perubahan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa, yaitu sebagai berikut.

Pertama, faktor politik, yaitu perubahan kebijakan pendidikan yang sejalan dengan pergantian rezim pemerintahan. Hal ini tampak paling jelas pada transisi dari Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968, di mana pergantian kurikulum digunakan sebagai instrumen untuk menegaskan legitimasi ideologis pemerintahan yang baru berkuasa serta menghapus jejak kebijakan rezim sebelumnya.

Kedua, faktor sosial-ekonomi, yaitu kebutuhan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan dunia kerja. Faktor ini tampak pada Kurikulum 1964 yang menekankan aspek praktis-fungsional untuk mendukung pembangunan, maupun pada KBK dan Kurikulum Merdeka yang menekankan kompetensi dan keterampilan abad ke-21 agar lulusan siap bersaing di dunia kerja global.

Ketiga, faktor pedagogis-akademik, yaitu evaluasi kritis terhadap efektivitas kurikulum sebelumnya berdasarkan temuan di lapangan maupun hasil riset pendidikan. Faktor ini tercermin secara jelas pada penyempurnaan Kurikulum 1994 menjadi Suplemen Kurikulum 1999 karena dianggap terlalu padat materi, maupun

pada lahirnya Kurikulum 1984 sebagai koreksi atas kekakuan administratif Kurikulum 1975.

Keempat, faktor regulatif-struktural, yaitu perubahan kurikulum yang didorong oleh terbitnya payung hukum baru di bidang pendidikan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai peraturan turunannya yang menuntut penyesuaian struktur dan standar kurikulum secara nasional.

Kelima, faktor global, yaitu tuntutan untuk menyesuaikan sistem pendidikan nasional dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global serta hasil studi komparasi internasional. Faktor ini tampak pada lahirnya Kurikulum 2013 yang dipengaruhi hasil studi PISA dan TIMSS, maupun pada penguatan literasi digital, koding, dan kecerdasan artifisial dalam Kurikulum Merdeka sebagai respons atas revolusi industri dan transformasi digital.

Keenam, faktor situasional, yaitu kondisi darurat tertentu yang memaksa pemerintah mengambil kebijakan cepat di bidang kurikulum. Kondisi krisis moneter dan gejolak reformasi tahun 1998 mendorong lahirnya Suplemen Kurikulum 1999, sebagaimana pandemi Covid-19 mendorong lahirnya Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan pemulihan pembelajaran (learning recovery) pada tahun 2022.

Keenam faktor tersebut umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain dalam mendorong lahirnya suatu kebijakan kurikulum baru. Pemahaman terhadap keenam faktor ini penting bagi para pemangku kebijakan pendidikan agar perubahan kurikulum di masa depan dapat dirancang secara lebih matang, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga tidak menimbulkan kejutan kebijakan (policy shock) yang membebani guru dan satuan pendidikan di lapangan.[41]

Relevansi Kurikulum Merdeka dengan Pendidikan Abad ke-21

Pendidikan abad ke-21 menuntut penguasaan empat kompetensi utama, yaitu berpikir kritis (critical thinking), kreativitas (creativity), kolaborasi (collaboration), dan komunikasi (communication), yang dikenal dengan istilah 4C. Selain itu, peserta didik juga dituntut memiliki literasi digital, literasi data, dan literasi manusia (humanity literacy) agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Kurikulum Merdeka, dengan prinsip fleksibilitas, pembelajaran berdiferensiasi, dan penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui proyek lintas mata pelajaran, dinilai relevan dalam menjawab tuntutan tersebut. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek (project based learning) yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengasah keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi secara langsung melalui pengalaman nyata, bukan sekadar hafalan teoretis.

[41] Muhammad Yusuf, "Mencegah Policy Shock: Analisis Integratif Faktor-Faktor Perubahan Kurikulum," *Jurnal Kebijakan Pendidikan Terpadu* 9, no. 2 (2025): 230–245.

Penguatan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) serta pengenalan mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial pada tahun ajaran 2025/2026 juga menunjukkan upaya pemerintah untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital dan revolusi industri, sekaligus menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dengan kebutuhan dunia industri di masa depan. Pendekatan deep learning yang menekankan aspek mindful, meaningful, dan joyful sejalan dengan teori belajar bermakna (meaningful learning) yang menekankan bahwa pembelajaran akan lebih efektif apabila peserta didik memahami keterkaitan materi dengan kehidupan nyata, bukan sekadar menghafal fakta-fakta yang terlepas dari konteks.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dalam menjawab tuntutan pendidikan abad ke-21 masih sangat bergantung pada kesiapan guru, ketersediaan sarana teknologi, serta pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sebagaimana juga terjadi pada implementasi KTSP di masa lalu, berpotensi menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan berbasis Kurikulum Merdeka secara nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan dukungan pemerintah melalui pelatihan guru, penyediaan sarana teknologi, serta pendampingan implementasi di satuan pendidikan menjadi kunci penting bagi keberhasilan kebijakan ini pada tahun-tahun mendatang.[42]

Kontinuitas, Diskontinuitas, dan Pembelajaran bagi Kebijakan Kurikulum Masa Depan

Menelaah sebelas periode kurikulum secara keseluruhan, tampak adanya pola kontinuitas sekaligus diskontinuitas dalam kebijakan kurikulum nasional. Kontinuitas terlihat pada beberapa nilai yang senantiasa dipertahankan lintas periode, seperti penguatan karakter kebangsaan, penanaman nilai moral dan keagamaan, serta orientasi pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nilai-nilai ini secara konsisten muncul mulai dari Rentjana Pelajaran 1947 hingga Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka, meskipun dengan istilah dan pendekatan yang berbeda-beda sesuai konteks zamannya.

Di sisi lain, diskontinuitas tampak jelas pada pendekatan metodologis yang digunakan, yang berayun dari orientasi materi (content-based) pada Kurikulum 1975 dan 1994, menuju orientasi proses dan keaktifan peserta didik pada Kurikulum 1984 dan Kurikulum Merdeka, kemudian menuju orientasi kompetensi dan hasil belajar pada KBK dan Kurikulum 2013. Ayunan pendulum antara pendekatan berbasis materi dan pendekatan berbasis proses/kompetensi ini menunjukkan bahwa perumus kebijakan kurikulum di Indonesia senantiasa mencari keseimbangan ideal, namun belum sepenuhnya menemukan format yang dianggap final dan diterima secara luas dalam jangka panjang.

[42] Fitriah Utama, "Tantangan Kesenjangan Infrastruktur Digital dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah Remote," *Jurnal Pemerataan Pendidikan* 10, no. 2 (2025): 180–195.

Pembelajaran penting yang dapat ditarik dari dinamika panjang ini adalah bahwa keberhasilan sebuah kurikulum tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan konsep di atas kertas, melainkan sangat bergantung pada kesiapan implementasi di lapangan, mencakup kesiapan guru, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kesesuaian dengan konteks sosial-budaya setempat. Kasus CBSA pada Kurikulum 1984 dan otonomi KTSP pada tahun 2006 menjadi contoh nyata bagaimana konsep yang secara teoretis progresif dapat mengalami hambatan serius akibat kesenjangan kapasitas implementasi antarwilayah dan antarsatuan pendidikan.

Pelajaran lain yang dapat dipetik adalah pentingnya kesinambungan kebijakan (policy continuity) dalam perumusan kurikulum. Pergantian kurikulum yang terlalu cepat dan tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum sebelumnya berpotensi menimbulkan kelelahan kebijakan (policy fatigue) di kalangan guru, yang harus terus-menerus beradaptasi dengan perubahan tanpa sempat memahami secara utuh esensi dari kurikulum yang tengah diterapkan. Kebijakan pemerintah pada tahun ajaran 2025/2026 yang memilih untuk tidak mengganti kurikulum secara drastis, melainkan menyempurnakan Kurikulum Merdeka yang telah berjalan sejak 2022, dapat dibaca sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus memberi waktu yang cukup bagi satuan pendidikan untuk benar-benar menginternalisasi perubahan yang ada.

Dengan demikian, arah kebijakan kurikulum di masa depan idealnya tidak hanya berorientasi pada pembaruan konsep semata, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, kesiapan implementasi, serta partisipasi aktif dari guru dan satuan pendidikan sebagai pihak yang paling langsung merasakan dampak dari setiap perubahan kebijakan kurikulum yang dirumuskan oleh pemerintah pusat.[43]

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berlangsung sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Perjalanan kurikulum di Indonesia telah melalui lebih dari sepuluh kali perubahan, mulai dari Rentjana Pelajaran 1947 yang berorientasi pada pembentukan semangat kebangsaan, hingga Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada fleksibilitas, penguatan karakter, dan kesiapan menghadapi era digital.

Setiap perubahan kurikulum dilatarbelakangi oleh faktor politik, sosial-ekonomi, pedagogis-akademik, regulatif-struktural, global, maupun situasional yang saling berkaitan satu sama lain. Pada tahun ajaran 2025/2026, kebijakan kurikulum nasional memasuki fase konsolidasi, di mana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka digunakan secara berdampingan dengan penguatan pendekatan pembelajaran mendalam serta mata pelajaran pilihan berbasis teknologi, sebagai

[43] Hasan Basri, "Rekonstruksi Kebijakan Kurikulum Masa Depan: Model Berkelanjutan dan Partisipatif," *Jurnal Peradaban Pendidikan* 13, no. 2 (2026): 205–220.

langkah strategis dalam mempersiapkan generasi yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing di tengah tuntutan pendidikan abad ke-21.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka di berbagai satuan pendidikan, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya, agar kebijakan kurikulum yang dirumuskan benar-benar dapat diimplementasikan secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Fitria. "Konsep Pancawardhana dalam Kurikulum 1964 dan Relevansinya dengan Karakter Bangsa." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kebudayaan* 10, no. 3 (2023): 201–215.

Arifin, Muhammad. "Transformasi Peran Guru dari Pusat Informasi Menjadi Fasilitator dalam CBSA." *Jurnal Inovasi Pembelajaran* 8, no. 3 (2023): 210–224.

Astuti, Rina. "Formalisasi Dokumen Kurikulum dan Problematika Pemerataan Pendidikan Era 1950-an." *Jurnal Sejarah dan Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 45–59.

Atmaja, dan Subaidi. "Dinamika dan Faktor yang Memengaruhi Perubahan Kurikulum di Indonesia." *Jurnal Penelitian Otentik* 5, no. 2 (Mei 2026): 145–158. https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/article/download/4967/3394/32333 .

Bahri, Syaiful. "Akumulasi Materi Pelajaran dalam Kurikulum 1994." *Jurnal Kaji Teori Pendidikan* 10, no. 2 (2023): 177–190.

Basri, Hasan. "Otonomi Satuan Pendidikan dalam Pengembangan Kurikulum Lokal pada KTSP." *Jurnal Administrasi dan Manajemen Sekolah* 8, no. 2 (2023): 101–114.

Basri, Hasan. "Rekonstruksi Kebijakan Kurikulum Masa Depan: Model Berkelanjutan dan Partisipatif." *Jurnal Peradaban Pendidikan* 13, no. 2 (2026): 205–220.

Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah di Era Reformasi. Jakarta: Buku Earthline, 2021.

Edu Channel Indonesia. "Kurikulum 1947." *EduChannel Indonesia* , 7 Juni 2021. https://educhannel.id/artikel/telaah-kurikulum/kurikulum-1947.html .

Faisal, Muhammad. "Periodisasi Kebijakan Kurikulum Indonesia (1947–2025): Perspektif Politik, Sosial, dan Pedagogis." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kurikulum* 6, no. 1 (2026): 12–29.

Gunawan, Hendra. "Konstruksi Manusia Pancasila dalam Kurikulum 1968." *Jurnal Pemikiran Pendidikan Indonesia* 8, no. 1 (2023): 67–80.

Hakim, Lukman. "PPSI dan Pengaruh Management by Objective (MBO) dalam Kurikulum 1975." *Jurnal Kurikulum dan Teknologi Pendidikan* 11, no. 2 (2023): 155–168.

Hasan, Ridwan. "Suplemen Kurikulum 1999: Respon Cepat Terhadap Overload Materi dan Reformasi Politik." *Jurnal Sejarah Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2022): 88–102.

Hidayat, Rahmat, dan Rahmad Hidayat. "Dinamika Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia: Adaptasi Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 11, no. 2 (2022): 102–115.

Hidayat, Rahmat. "Teknik Penelusuran Literatur dan Pengelolaan Data Dokumentasi pada Penelitian Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Metode Penelitian Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 78–91.

Huda, M.Nurul. "Evolusi Kurikulum Indonesia Pasca-Pengakuan Kedaulatan: Dari Idealistik Menuju Pragmatis." *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional* 5, no. 2 (2022): 89–101.

IMM JPMIPA UAD. "Dilema Dinamis: Dampak Negatif dari Pergantian Kurikulum yang Terlalu Sering." *Kajian Pendidikan IMM JPMIPA UAD* , 28 Mei 2024. http://immjpmipa.fkip.uad.ac.id/2024/05/28/dilema-dinamis-dampak-negatif-dari-pergantian-kurikulum-yang-terlalu-sering/ .

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. *Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.* Jakarta: Kemendikdasmen, 2025.

Mastuang, dan Muhammad Syukri. *Metodologi Penelitian Pustaka (Library Research) dalam Ilmu Pendidikan.* Yogyakarta: Deeppublish, 2022.

Mulyadi, Tri. "Pendekatan Integratif dalam Kurikulum 1964 dan Hambatan Politik Transisi Kekuasaan." *Jurnal Pendidikan Historis* 6, no. 2 (2022): 134–147.

Prasetyo, Eko. "Beban Birokrasi Guru dalam Penulisan Satuan Pelajaran Kurikulum 1975." *Jurnal Evaluasi Pendidikan* 9, no. 1 (2022): 33–46.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2021.

Rahayu, Sri. "Dinamika Kebijakan Kurikulum Pasca-Kemerdekaan: Analisis Historis Rentjana Pelajaran 1947." *Jurnal Historiografi Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 15–28.

Rahmawan, Agus. "Implementasi Penuh Kurikulum Merdeka 2026: Titik Konsolidasi Sejarah Kurikulum Nasional." *Jurnal Perkembangan Pendidikan Nasional* 14, no. 1 (2026): 15–30.

Ridwan, Ahmad. "Analisis Evaluatif Kebijakan Kurikulum Nasional: Pembelajaran dari Masa ke Masa untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan Masa Depan." *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 44–58.

Risnawati. "Analisis Kebijakan Kurikulum 1994 Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pendidikan* 7, no. 1 (2021): 50–63.

Rosyadi, Dedi. *Politik Kurikulum Orde Baru: Hegemoni Ideologi dan Penataan Pendidikan (1968–1998).* Yogyakarta: Deeppublish, 2022.

Sartika, Dewi. "Mitos dan Realita Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) di Lapangan." *Jurnal Riset Pendidikan Dasar* 6, no. 2 (2024): 145–159.

Setiawan, Andi. *Manajemen Pendidikan Orde Baru: Repelita dan Kodifikasi Kurikulum.* Malang: UB Press, 2021.

Setiawan, Bambang, dan Nur Aini. "Historiografi Kurikulum di Indonesia: Studi Metodologis dan Celah Kajian Pascapandemi." *Jurnal Riset Pendidikan Dasar dan Menengah* 4, no. 3 (2023): 210–225.

Setiawan, Roni. "Perjalanan Revisi Kurikulum 2013 dan Transisinya Menuju Era Kurikulum Merdeka." *Jurnal Inovasi Kurikulum* 11, no. 2 (2025): 134–149.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2024.

Supriadi, Dedi. "Kurikulum sebagai Konstruksi Sosial-Politik: Analisis Historis Visi Pendidikan Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam dan Pendidikan* 28, no. 1 (2024): 55–71.

Suprijono, Agus. *Politik Pendidikan Era Soekarno: Analisis Kurikulum 1964.* Jakarta: Kencana, 2021.

Suroso, Bambang. *Studi Historis Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia (1947–1968).* Bandung: Alfabeta, 2021.

Tim Akademik STAIDA. "Laporan Urgensi Perubahan Kurikulum dan Dampaknya pada Pendidikan Indonesia." *STAIDA Sumsel* , 29 April 2025. https://staidasumsel.ac.id/laporan-urgensi-perubahan-kurikulum-dan-dampaknya-pada-pendidikan-indonesia/ .

Utama, Fitriah. "Tantangan Kesenjangan Infrastruktur Digital dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah Terpencil." *Jurnal Pemerataan Pendidikan* 10, no. 2 (2025): 180–195.

Wahyuni, Sri. "Penilaian Autentik Berbasis Kelas dalam KBK 2004 dan Kendala Sosialisasi Nasional." *Jurnal Asesmen Pendidikan* 9, no. 3 (2024): 189–202.

Widyastono. *Manajemen Penggarapan KTSP Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Yusuf, Muhammad. "Mencegah Kejutan Kebijakan: Analisis Integratif Faktor-Faktor Perubahan Kurikulum." *Jurnal Kebijakan Pendidikan Terpadu* 9, no. 2 (2025): 230–245.

Zainuri, Ahmad. *Sejarah Kurikulum Pendidikan di Indonesia: Dari Masa Kemerdekaan Hingga Era Digital.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2022.

Zazin, Nur. *Perkembangan Teori Belajar Konstruktivistik dalam Kurikulum Nasional.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2022.

Zulaikha, Siti. "Ideologi Politik dan Struktur Kurikulum 1968 di Indonesia." *Jurnal Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 112–126.